

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Rendahnya kepedulian warga negara terhadap permasalahan lingkungan terutama masalah sampah kian mengkhawatirkan. Bahwasannya pertumbuhan jumlah penduduk membawa implikasi terhadap volume sampah yang diproduksi oleh masyarakat. Produksi sampah berbanding lurus dengan perkembangan dan penambahan jumlah penduduk (Setiadi, 2010, hlm. 1). Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat berpengaruh kepada pola hidup masyarakat yang berdampak pada meningkatnya tingkat konsumsi mulai dari makanan dan kemasannya. Sementara kemampuan menangani sampah masih terbatas pada cara lama yaitu “kumpulkan-angkut-buang “ seperti terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Penanganan sampah seperti ini menunjukkan minimnya peran warga negara dalam mengatasi permasalahan sampah. Mac Gragor (dalam Escruihuela, 2008) menyebutkan bahwa warga negara egois dan tidak bertanggung jawab dipahami menjadi akar dari masalah lingkungan. Paradigma masyarakat yang sudah tumbuh bertahun-tahun ialah “masyarakat membayar, pemerintah yang mengelola”, belum dapat mengubah pola perilaku masyarakat dalam proses pemecahan masalah sampah di tengah masyarakat (Mariana, 2012, hlm. 729).

Jika paradigma ini terus berlaku maka akan sulit sekali mengatasi permasalahan sampah seperti yang dihadapi pada beberapa kota besar di Indonesia. Permasalahannya hampir sama yaitu produksi sampah dari tahun ke tahun yang terus meningkat, kualitas lingkungan perkotaan kian menurun karena penanganan sampah yang kurang memadai, meningkatnya kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan tanpa diimbangi dengan penerimaan retribusi yang memadai, lahan TPA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) yang sulit didapatkan walaupun ada harus menghadapi penolakan warga setempat, teknis pengoperasian prasarana serta sarana persampahan yang juga tidak memadai dan lain-lain.

Sebagaimana yang menjadi permasalahan di Kota Bandung yaitu terbatasnya jumlah Truk pengangkut sampah yang seharusnya diperlukan 140 unit untuk menjangkau 160 TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) sementara yang tersedia 120 unit. Sehingga setiap hari sampah di Kota Bandung

dari sekitar 1.600 ton yang dapat terangkut ke TPA Sarimukti sekitar 1.200 ton saja. Sisanya, sebanyak 150-250 ton diolah warga, 150-250 ton sampah lainnya tidak terangkut, dan dibuang di tempat pembuangan sampah liar (Nugroho, 2010). Kondisi ini menjadi lebih buruk ketika beberapa alat berat di TPA Sarimukti mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat digunakan untuk memproses sampah di TPA tersebut seperti yang terjadi di awal tahun 2013. Akibatnya, sampah yang menumpuk di Kota Bandung pun tidak dapat diangkut sehingga bertumpuk di TPS sampai meluap ke jalanan. Kondisi seperti ini seperti mengulang kejadian di tahun 2005, ketika itu Kota Bandung sempat dijuluki Bandung Lautan Sampah dan mendapat predikat kota terkotor menyusul longsornya gunung sampah di TPA Leuwigajah yang menewaskan 156 orang yang tertimbun sampah (Wulan, 2013).

Menurut Surakusumah (Tanpa Tahun) menyebutkan bahwa ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan yang dapat menyebabkan terulang kembalinya Bandung lautan sampah. Permasalahan yang dapat menyebabkan Bandung kota sampah jilid kedua antara lain (1) kesadaran masyarakat Bandung yang masih rendah, (2) Kemampuan pelayanan Perusahaan Daerah (PD) kebersihan kota Bandung yang terbatas, (3) Masyarakat tidak memisahkan antara sampah organik dan non organik, (4) Lahan TPA yang terbatas, (5) Penegakan hukum (*law inforcement*) tidak konsisten. Padahal jika tidak segera diatasi permasalahan sampah ini akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi. Jika pengelolaan sampah sistem *open dumping* yang selama ini dilakukan maka tidak akan mampu menampung sampah karena keterbatasan lahan. Oleh karenanya sejak tahun 2004, pemerintah Kota Bandung merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) sebagai solusi. Konsep ini sebenarnya sederhana, yaitu mengubah sampah menjadi energi listrik yang melibatkan proses pembakaran. Namun, konsep ini dianggap tetap membawa dampak buruk pada lingkungan dan kesehatan (Gunawan, dkk, 2015).

Rusaknya lingkungan dan kurangnya perlindungan terhadap lingkungan dewasa ini telah memunculkan gerakan yang sering disebut *environmentalism* (environmentalisme), yang intinya adalah etika kepedulian terhadap alam.

Gerakan peduli lingkungan berupaya melakukan penyadaran atas kesaling tergantung manusia dan alam yang dapat mempengaruhi pola hidup dan perilaku manusia. Gerakan-gerakan environmentalis ini membawa implikasi penting kepada konsepsi kewarganegaraan. Mereka mempertanyakan secara serius tentang negara sebagai pemilik kebijakan publik serta meragukan cara-cara masyarakat modern dalam mendominasi dan mengapropriasi alam untuk produksi, konsumsi dan pertukaran sehingga mereka mempertanyakan identitas atau kedudukan moralitas manusia dalam alam lingkungannya (Kalidjernih, 2007).

Gerakan-gerakan environmentalisme ini telah muncul dalam berbagai gerakan nyata di masyarakat, baik itu digagas oleh pemerintah maupun non-pemerintah seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam skala nasional maupun lokal serta berbagai komunitas yang berdiri sendiri. Gerakan environmentalisme atau gerakan peduli lingkungan telah digagas seperti Gerakan Indonesia Bersih yang dicetuskan atas inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono tahun 2012. Adapun terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yaitu menggagas Gerakan Pungut Sampah. Sedangkan Gerakan kepedulian lingkungan yang digagas oleh LSM cukup banyak, salah satunya yang dilakukan oleh LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang telah memiliki perwakilan di berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai gerakan kepedulian lingkungan yang beragam.

Khusus di Kota Bandung sendiri berbagai komunitas muncul dan berkembang dengan berbagai latar belakang kepeduliannya terhadap permasalahan lingkungan, seperti dalam pengelolaan sampah. Hal ini mendapat respon yang baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terlebih beberapa tahun belakangan ini sedang mengembangkan konsep *eco-town*. Dijelaskan oleh Purbani (2012) konsep *Eco-Town* merupakan salah satu alternatif solusi dari masalah lingkungan yang saat ini masih belum terpecahkan. Untuk menanggapi isu-isu lingkungan baik secara global maupun nasional. Sebagai percontohan, Kota Bandung harus mengembangkan dan mencoba untuk menerapkan konsep *Eco-Town* sehubungan dengan perspektif lokal, yang meliputi rencana, regulasi, institusi, program, dan kegiatan yang mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan

menengah. Dimana pengelolaan sampah menjadi masalah utama implementasi Bandung *Eco-Town*. Tujuan utama dari program Bandung *Eco-Town* untuk membentuk masyarakat Bandung pendaur ulang. Dengan strategi pengembangan ekonomi kreatif, dan masalah penanganan dalam hal pemasaran dan investasi industri berbasis 3-R atau *Recover, Recycle, and Reuse* (pemulihan, daur ulang, dan penggunaan kembali).

Berbagai solusi dan rencana pembangunan untuk masa mendatang yang tidak diiringi dengan pengembangan perilaku warga negaranya yang baik sebagai pelaku maka pembangunan itu kurang berarti. Akan banyak permasalahan yang muncul seperti kita rasakan saat ini bagaimana permasalahan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan yang dilakukan tanpa kebijakan, hasilnya upaya yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Misalnya dalam kebijakan kantong plastik berbayar dimana Kota Bandung sebagai salah satu wilayah percontohan yang menerapkan kebijakan ini, tidak cukup berhasil mengurangi konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik. Adapun kebijakan terbaru ialah pelarangan penggunaan kemasan dari bahan *styrofoam*. Bahkan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh Pemkot Bandung tidak serta merta merubah perilaku warga Bandung. Seperti diakui Wali Kota Bandung bahwa masih banyak warga Bandung yang membuang sampah ke sungai dan jalan (Prima, 2015).

Permasalahan sampah sebagai salah satu masalah lingkungan akan terkait dengan moral dan perilaku manusia, karena kelestariannya bergantung kepada dua konsep tersebut. Sehingga pembenahan terhadap moral dan perilaku manusia dapat dilakukan melalui etika bersama yang mengikat secara transenden. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, etika dan moral dapat digali dari Pancasila sebagai dasar negara yang harus ditumbuhkembangkan dan diimplementasikan oleh setiap warga negara hubungannya antara manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas sehingga berdampak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan (Syahri, 2013).

Melihat realita kepedulian warga negara saat ini khususnya warga Kota Bandung dapat tergambar seperti pengamat sosial Universitas Padjajaran, Ari

Ganjar Hardiansyah (dalam Fitrah, 2016) kemukakan, bahwasannya pekerjaan warga Bandung 90% di sektor industri dan perdagangan yang banyak menyita waktu mereka, sehingga waktu bersosialisasi dengan masyarakat semakin sedikit. Jadi karena banyak dihabiskan di tempat kerja maka kepeduliannya semakin menurun. Beliau menilai ada pergeseran kepedulian sosial di kalangan warga Bandung. Berawal dari kepedulian berbasis lingkungan dan wilayah, berubah jadi kepedulian sosial berbasis komunitas, baik komunitas hobi, kesukuan maupun agama. Sehingga upaya mengembangkan kepedulian warga negara terhadap lingkungannya menjadi hal yang penting. Karena sebagian masalah lingkungan yang ada adalah akibat dari kelalaian dan kurangnya kepedulian warga negara terhadap lingkungan. Rencana pembangunan untuk masa mendatang tidak diiringi dengan pengembangan perilaku warga negaranya yang baik sebagai pelaku maka pembangunan itu kurang berarti. Akan banyak permasalahan yang muncul seperti yang kita rasakan saat ini bagaimana permasalahan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan yang dilakukan tanpa kebajikan (*virtues*).

Kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) melekat pada peran warga negara, dan mengarahkan kepada kita bagaimana warga negara yang baik harus bertindak dan berpikir. Dalam pemikiran warga negara itulah, kebajikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan rasa keterikatan dan tanggung jawab bagi masyarakat dimana warga negara adalah bagian di dalamnya. Dalam tindakannya, warga negara yang baik akan cenderung untuk memberikan prioritas kepada publik dari pada kepentingan pribadi. Kebajikan kewarganegaraan harus diajarkan atau dikembangkan agar dimiliki oleh warga negara. Karena negara memiliki minat khusus dengan keberadaan kebajikan kewarganegaraan dalam masyarakat, setiap warga negara muda diwajibkan untuk bersekolah, di mana mereka menerima dinataranya Pendidikan Kewarganegaraan (Blanken, 2012).

*Citizenship or civic education* atau pendidikan kewarganegaraan (PKn) dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Oleh karena itu, Kerr menyebutkan bahwa ontologi *citizenship education* mencakup mata pelajaran

“*citizenship, civic, social sciences, social studies, world studies, society, studies of society, life skills, and moral education*”, serta mata pelajaran yang relevan, yakni: “*history, geography, economics, law, politics, environmental studies, value education, religious studies, language, and science*”. Dari situ tampak bahwa “*citizenship education*” atau pendidikan kewarganegaraan dilihat sebagai suatu domain pendidikan yang bersifat multidimensional dan tersebar secara programatik dalam keseluruhan tatanan kurikulum (Budimansyah dalam Syahri, 2013).

Pengembangan dimensi *civic virtue* merupakan landasan bagi pengembangan *civic participation* sebagai tujuan akhir dari *civic education*. Menurut Quigley, dkk (dalam Winataputra, 2012, hlm 80) Dimensi *civic participation* dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari siswa, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran serta aktif warga negara. Untuk dapat berperan serta aktif, Quigley, dkk menambahkan (dalam Winataputra, 2012, hlm 80) bahwa diperlukan pengetahuan tentang konsep fundamental, sejarah, isu dan peristiwa aktual dan fakta berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu secara kontekstual, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan watak dari warga negara.

Jika dilihat dari sasaran dikembangkannya *civic virtue* dan *civic participation* dapat disimpulkan bahwa salah satu dimensi dari *civic education* adalah pengembangan watak dan karakter warga negara yang peka, tanggap dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negaranya (Winataputra, 2012, hlm 80). *Civic mindedness* atau kepekaan terhadap masalah kewarganegaraan atau dapat disebut kepedulian warga negara merupakan salah satu dari sekian banyak karakter dari kebajikan kewarganegaraan yang penting. Seperti dijelaskan oleh Brabant dan Braid (2009) bahwa kepedulian warga negara adalah atribut penting dari identitas individu yang melihat diri mereka sebagai warga negara dan memilih untuk berpartisipasi dalam proses kerjasama di hati komunitas kewarganegaraan (*civic community*). Kewarganegaraan, jika dipahami

sebagai pola pikir, bisa menjadi praktek individu untuk dapat bekerja dalam perbedaan.

Steinberg (2011) menjelaskan bahwa dengan kepedulian warga negara akan mengacu pada kecenderungan atau watak seseorang untuk memiliki pengetahuan agar dapat terlibat dalam masyarakat, dan memiliki komitmen untuk bertindak atas rasa tanggung jawab sebagai anggota dari suatu masyarakat. Menurut Bellah, dkk (dalam Campbell, 2015) kepedulian warga negara merupakan salah satu contoh dari kebiasaan hati, yaitu kebiasaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai umum. Serta kepedulian warga negara ini akan melibatkan kepekaan dan empati bagi anggota kelompok yang kurang beruntung berupa kesadaran sosial (Batchelder, dkk, dalam Snell, 2015).

Secara teori, menurut Bertlesmann Foundation (2003) bahwa dengan meningkatnya kepedulian warga negara maka masyarakat akan menjadi kuat dan selanjutnya menjadi lebih baik. Price (2000) menyebutkan bahwa kepedulian warga negara menjadi perekat kebersamaan masyarakat, dan masyarakat yang memiliki kepedulian warga negara memastikan demokrasi tetap kokoh, karena ketika kepercayaan sosial yang tinggi, individu memiliki kemungkinan peningkatan untuk mencapai hubungan yang dekat dalam membangun hubungan kerja sama (dalam Hua dan Wan, 2001).

Perasaan yang positif terhadap masyarakat ini akan mengarah kepada pemilikan motivasi yang besar kepada keterlibatan kewarganegaraan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sehingga jelas dari sekian banyak karakteristik kebajikan kewarganegaraan ini, nilai kepedulian warga negara (*civic-mindednes*) dianggap dapat mendukung penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini, salah satunya masalah lingkungan. Sebuah gagasan maupun tindakan dapat bermanfaat bagi masyarakat jika hal tersebut menunjukkan kepedulian untuk kepentingan publik atau kemanusiaan secara keseluruhan. Dengan cara melakukan hal yang bermanfaat bagi masyarakat yang terdorong dari gagasan warga negara tersebut. Setelah gagasan muncul dan diwujudkan secara nyata melalui berbagai gerakan, selanjutnya yang diperlukan adalah komitmen kewarganegaraan sebagai hal yang menjamin keberlangsungan suatu gerakan.

Peneliti berkeyakinan munculnya gerakan peduli lingkungan dapat menjadi salah satu bentuk pembinaan kebijakan kewarganegaraan yang didalamnya mampu mengembangkan nilai kepedulian warga negara. Dengan dikembangkannya nilai kepedulian warga negara ini diharapkan akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini termasuk dalam masalah kelestarian lingkungan hidup yang terwujud dalam gerakan kepedulian lingkungan. Untuk itu maka penulis mengangkat permasalahan ini kedalam suatu penelitian dengan judul **“Pengembangan Nilai Kepedulian Warga Negara Melalui Gerakan Peduli Lingkungan di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung (Studi Kasus Pada Komunitas Kami Kawasan Bersih “Kakasih”)**”

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dijabarkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya kepedulian warga negara terhadap masalah lingkungan sehingga sedikit yang terselaesaikan jika tanpa adanya dukungan kepedulian warga negara.
2. Upaya mengatasi masalah lingkungan yang ada masih kurang terfokuskan terhadap nilai-nilai dan rasa kepedulian warga negara.
3. Sulit terjaminnya kepedulian warga negara untuk dapat berjalan tanpa adanya dorongan dari para pendukungnya berupa komitmen yang kuat
4. Masih rendahnya dorongan dan keinginan dari pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam pembinaan kepedulian warga negara.
5. Pengembangan nilai kepedulian warga negara masih banyak dalam bentuk wacana belum banyak teraplikasi dalam gerakan kepedulian lingkungan yang lebih konkrit pada lingkungan keluarga, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari identifikasi masalah penelitian diatas dapat ditarik menjadi beberapa rumusan masalah, yang terfokus pada:



1. Faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat dalam pengembangan nilai kepedulian warga negara pada komunitas peduli lingkungan di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung?
2. Gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan komunitas peduli lingkungan di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol dalam mengembangkan nilai kepedulian warga negara Kota Bandung?
3. Adakah kemanfaatan dan kemampuan mengembangkan nilai kepedulian warga negara di Komunitas Peduli Lingkungan Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, mengorganisasikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan nilai kepedulian warga negara melalui Gerakan Pedulian Lingkungan. Secara khusus penelitian bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat dalam pengembangan nilai kepedulian warga negara pada komunitas peduli lingkungan di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung?
2. Mengidentifikasi gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan komunitas peduli lingkungan di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol dalam mengembangkan nilai kepedulian warga negara Kota Bandung?
3. Menganalisis adakah kemanfaatan dan kemampuan mengembangkan nilai kepedulian warga negara di Komunitas Peduli Lingkungan Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung?

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Segi Teori**

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan, menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi seputar pengembangan nilai kepedulian warga negara melalui gerakan peduli lingkungan guna memberikan pengembangan bagi keilmuan Pendidikan Kawarganegaraan (PKn) yang mencerminkan karakter, partisipasi dan komitmen warga negara.

## 2. Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai konsep PKn guna mengembangkan kepedulian warga negara sebagai salah satu karakter dari kebijakan kewarganegaraan terhadap permasalahan lingkungan sehingga program yang dilaksanakan oleh komunitas peduli lingkungan ini dapat menjadi contoh dan masukan bagi komunitas masyarakat lainnya atau bagi Pemkot Bandung dalam melaksanakan program/kegiatan yang melibatkan kepedulian warga negara secara luas. Agar dipahami apa yang mungkin akan mendorong atau bahkan menghambat terlaksananya program-program serupa di wilayah lain maupun di masa mendatang. Agar gerakan-gerakan yang melibatkan kepedulian warga negara ini tidak semata-mata hanya menjadi tren sesaat.

## 3. Segi Praktis

- a. Para pengembang kurikulum PKn sebagai tambahan muatan isi tentang kepedulian warga negara sebagai salah satu bentuk kebijakan kewarganegaraan dengan menjalin konsep dan praktek pendidikan sosial kemasyarakatan pada peserta didik dan masyarakat.
- b. Penelitian lanjutan, sebagai bahan informasi dan perbandingan agar dikembangkan konsep dan teori lain untuk meningkatkan peran pendidikan bagi upaya pengembangan kepedulian warga negara.

## 4. Segi Isu Dan Aksi

Secara isu dan aksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak berikut:

- a. Pada masyarakat, sebagai bahan refleksi dan motivasi untuk dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kepedulian warga negara yang bisa menjadi pendorong bagi munculnya berbagai gerakan kepedulian lingkungan.
- b. Para akademisi, praktisi pendidikan, aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat, sebagai bahan kontribusi konsep dan paradigma pengembangan kepedulian warga negara, pengembangan pendidikan maupun pelestarian lingkungan yang melibatkan peran aktif warga negara atau masyarakat.
- c. Pejabat pemerintah, terutama pemkot Bandung agar memperhatikan hal apa saja yang dapat mendorong, tumbuh dan berkembangnya berbagai gerakan kepedulian lingkungan, baik dari segi positif maupun negatif atas gerakan-

gerakan yang sudah terlaksana guna dijadikan rujukan dalam perencanaan program dimasa yang akan datang, baik yang digagas oleh perorangan, kelompok/komunitas, maupun pemerintah setempat.

## **F. Struktur Organisasi Tesis**

Tesis ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, merupakan rasional yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Isi dari bab ini meliputi; a) Latar belakang masalah; identifikasi masalah; b) Rumusan masalah; c) Tujuan penelitian; d) Manfaat penelitian; serta e) Struktur organisasi Tesis ini.

Bab II, Kajian Pustaka merupakan gambaran berbagai konsep, generalisasi dan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Isi dari bab ini meliputi; a) Nilai kepedulian warga neagra; b) Konsep kebajikan kewarganegaraan; c) Gerakan peduli lingkungan; d) Kerangka pemikiran serta beberapa e) Penelitian terdahulu yang terkait dan posisi peneliti.

Bab III, Metodologi Penelitian, merupakan penjelasan yang rinci mengenai; desain penelitian, metode penelitian, definisi konseptual. Dijelaskan pula subjek dan lokasi penelitian, keabsahan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan gambaran data yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian dianalisis menggunakan berbagai teori yang relevan. Isi dari bab ini meliputi; a) Gambaran umum lokasi penelitian, b) deskripsi hasil penelitian, dan c) pembahasan hasil penelitian.

Bab V, Simpulan, implikasi dan Saran, merupakan jawaban dari aspek yang diteliti. Bab ini terdiri dari simpulan (umum dan khusus), implikasi serta saran.